

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian dari implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Analisis tersebut berdasarkan pengalaman *personal* penerima BPUM (informan dalam penelitian ini) terkait proses sosialisasi program, proses pendaftaran, pencairan dana dan pemanfaatan program yang kemudian dikaitkan dengan teori kebijakan publik oleh Merilee S Grindle menggunakan dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui proses wawancara kepada informan, melakukan observasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai bukti pendukung peneliti melakukan pengambilan data di lapangan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Program BPUM adalah bentuk kebijakan publik yang diimplementasikan kedalam program bantuan sosial dari pemerintah dan bertujuan untuk membantu UMKM menunjang ekonomi usahanya yang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru program ini dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan sosialisasi program, proses pendaftaran, alur pencairan dana hingga pemanfaatan program. Program ini dianggap sebagai praktek dari rezim populisme yang dilakukan oleh elit politik (Presiden) untuk memperoleh dukungan rakyat serta memperkuat legitimasinya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini terlihat pada sisi penamaan program yaitu BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dimana kata “banpres” merupakan singkatan dari “bantuan presiden”.

**Kata Kunci: Implementasi, BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro), UMKM, COVID-**

This study is a qualitative study that aims to describe and analyze the research results of the implementation of the Banpres program for Micro, Small and medium enterprises (MSMEs) during the COVID-19 pandemic in Tenayan Raya District, Pekanbaru city. The analysis is based on the personal experience of BPUM recipients (informants in this study) related to the socialization process of the program, the registration process, disbursement of funds and utilization of the program which is then associated with the theory of public policy by Merilee S Grindle using two variables, namely the content of Policy (content of policy) and the context of policy (context of policy). The data collection method used is through the process of interviews to informants, observation and documentation are used as evidence supporting the researcher to collect data in the field. The data obtained are presented in descriptive form to describe the facts found in the field.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the BPUM Program is a form of public policy that is implemented into social assistance programs from the government and aims to help MSMEs support their business economies that are experiencing a crisis due to the COVID-19 pandemic. In the District of Tenayan Raya, Pekanbaru city, this program is implemented in stages, beginning with the socialization of the program, the registration process, the flow of disbursement of funds until the utilization of the program. This Program is considered a practice of the populism regime carried out by the political elite (president) to gain popular support and strengthen its legitimacy in handling COVID-19 in Indonesia. This can be seen in the naming of the program, namely BPUM (Productive Presidential Aid for Micro Enterprises) where the word “banpres” stands for “presidential assistance”.

**Keywords: Implementation, BPUM (Productive Presidential Aid for Micro Enterprises), MSMEs, COVID-19**